



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**BIRO HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB**  
**TAHUN 2022**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan pelayanan publik diperlukan instrumen yuridis yang dapat mengimplementasikan segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berorientasi pada terwujudnya visi Gubernur yaitu NTB Gemilang, dengan misi NTB Aman dan Berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas Biro Hukum Setda Provinsi NTB telah menetapkan beberapa rencana strategis untuk menunjang pelayanan tupoksi sebagaimana telah dijabarkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rencana Strategis Biro Hukum adalah sebagai berikut :

1. Dalam penanganan kasus-kasus Perdata dan Tata Usaha Negara, Biro Hukum dengan segala kemampuan SDM yang ada telah menangani kasus-kasus tersebut dengan baik dan optimal.
2. Penyelesaian produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.  
Terhadap peraturan yang bersifat Regeling seperti Perda dan Pergub proses pembahasan/penyelesaiannya sangat tergantung dari dinamika yang ada di DPRD, sedangkan untuk proses penyelesaian pergub lamanya  $\pm$  14 hari, untuk penyelesaian Produk Hukum bersifat Beschikking yaitu Keputusan Gubernur lamanya  $\pm$  7 hari.
3. Membentuk tim kajian evaluasi dan fasilitasi yang bertugas melakukan evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota.
4. Program sosialisasi produk hukum melalui Web JDIH NTB.
5. Peningkatan pelaksanaan RANHAM Provinsi NTB

Demikian ringkasan eksekutif ini kami buat semoga apa yang menjadi rencana kerja dapat terwujud sebagaimana mestinya.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB telah kami susun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan merupakan penilaian serta evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur ke Enam yaitu **“Aman dan Berkah melalui Perwujudan Masyarakat Madani yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”**.

Pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2019-2023 yang dijabarkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, harus diakui dalam pelaksanaannya bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah untuk dapat dilakukan secara sempurna. Namun demikian tidak ada yang tidak dapat dicapai sepanjang semua unsur yang ada baik pada Bagian maupun pada Sub Bagian menyatukan tekad untuk mewujudkan apa yang telah menjadi visi dan misi bersama.

LKjIP yang kami susun ini tidak dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi semua kegiatan secara rinci namun hanya menilai dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis dan relevan dengan Renstra.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin dan dicatat sebagai ibadah serta mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.

MATARAM, 2023  
KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN,SH.MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700525 199603 1 002

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
C. PERSONALIA .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
A. RENCANA STRATEGIS .....	5
B. TUJUAN DAN SASARAN .....	6
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	7
D. PERJANJIAN KINERJA .....	8
E. PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	10
B. REALISASI KEUANGAN.....	13
BAB IV PENUTUP .....	16

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama 2022
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Rencana Aksi Tahun 2022
5. Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disebutkan bahwa tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/materi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum.

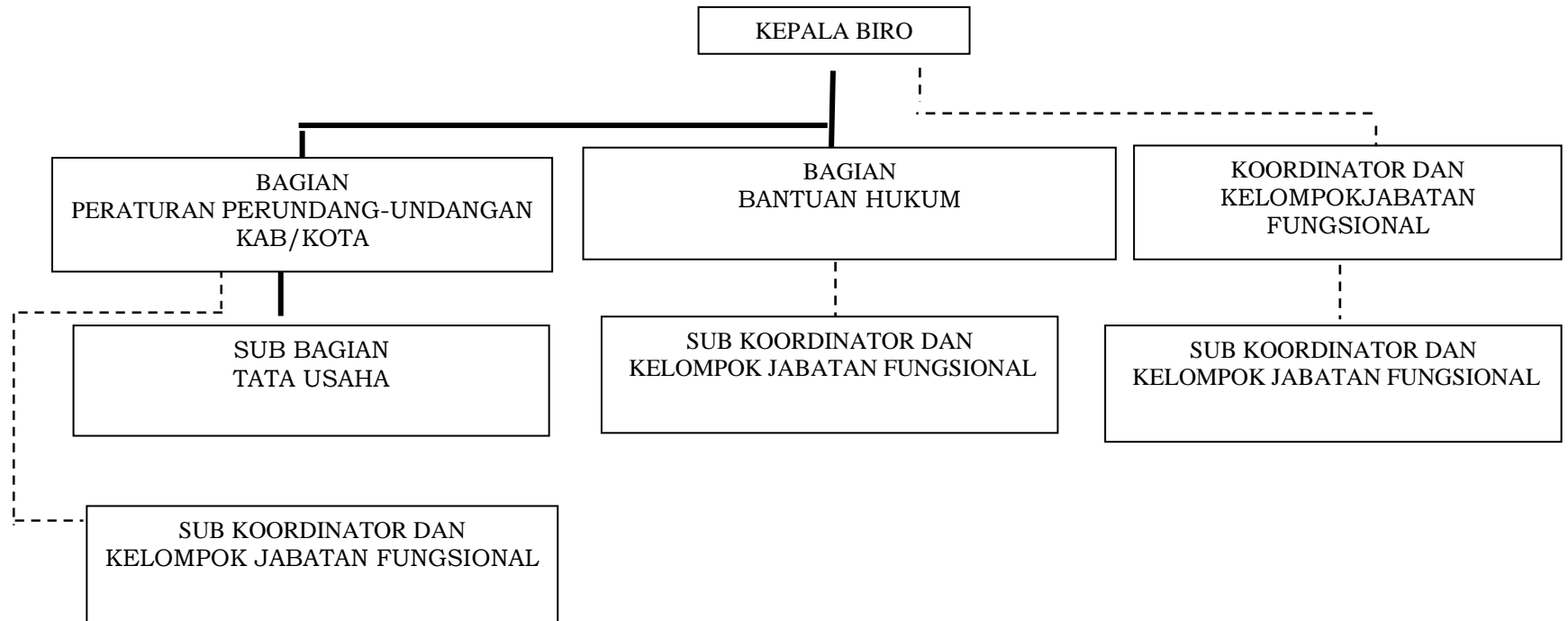
Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Hukum;
2. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Hukum;
3. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Hukum;
4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

#### **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Hukum Setda Provinsi NTB terdiri dari :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



### C. PERSONALIA

Jumlah Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan status kepegawaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, Tenaga PTT 1 (satu) orang dan Tenaga Kontrak 14 (empat belas) orang per 31 Desember 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel**  
**Personalia Berdasarkan Kualifikasi Eselon/Jabatan**  
**Sampai dengan 31 Desember 2022**

NO.	ESELON/JABATAN	JUMLAH	KET
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	2	
3	Eselon IV	1	
4	Analisis Hukum Ahli Madya	1	
5	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda	6	
6	Analisis Hukum Ahli Pertama	1	
7	Pelaksana	15	
<b>J U M L A H</b>		<b>27</b>	

**Tabel**  
**Personalia Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Gol. Ruang**  
**Sampai dengan 31 Desember 2022**

NO.	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH	KET
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	
5	Pembina (IV/a)	3	
6	Pejabat Tingkat I (III/d)	11	
7	Pejabat (III/c)	4	
8	Pejabat Muda Tingkat I (III/b)	2	
9	Pejabat Muda (III/a)	3	
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	

NO.	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH	KET
11	Pengatur (II/c)	1	
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	
13	Pengatur Muda (II/a)	-	
14	Juru Tingkat I (I/d)	-	
15	Juru (I/c)	-	
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
17	Juru muda (I/a)	-	
<b>J U M L A H</b>		<b>27</b>	

**Tabel**

**Personalia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Sampai dengan 31 Desember 2022**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Strata III (S3)	1	
2	Strata II (S2)	6	
3	Strata I (S1)	17	
4	Diploma IV	1	
5	Diploma III	-	
6	SLTA/Sederajat	2	
7	SLTP/Sederajat	-	
8	SD/Sederajat	-	
<b>J U M L A H</b>		<b>27</b>	

**Tabel**

**Tenaga PTT dan Kontrak  
Sampai dengan 31 Desember 2022**

NO.	PTT/Tenaga Kontrak	JUMLAH	KET
1	PTT	1	
2	Tenaga Kontrak	14	
<b>J U M L A H</b>		<b>15</b>	



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2019-2023**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yang mengacu pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagaimana diuraikan berikut ini.

##### **1. Visi**

Visi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”** dalam visi yang diusung terdapat kata kunci **“NTB GEMILANG”** yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtikarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

##### **2. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019

- 2023 sebagai berikut:

1. **NTB TANGGUH DAN MANTAP** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah;
2. **NTB BERSIH DAN MELAYANI** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

3. **NTB SEHAT DAN CERDAS** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. **NTB ASRI DAN LESTARI** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. **NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI** melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
6. **NTB AMAN DAN BERKAH** melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Biro Hukum Setda Prov.NTB mendapat tanggungjawab untuk melaksanakan Misi ke-6 yakni "**NTB AMAN DAN BERKAH**" melalui program yang telah tertuang dalam lampiran perjanjian kinerja.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Biro Hukum Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan: "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berkualitas di Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**".

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sasaran yaitu: "**Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**".

Dari ke enam misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Program
NTB AMAN DAN BERKAH Melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter Dan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Madani (Bahagia)	Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

### C. Rencana Kinerja Tahunan

Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	100%
		2. Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	100%
		3. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	100%
		4. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding	100%
		5. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	100%
		6. Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		7. Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	100%

#### D. Perjanjian Kinerja

Pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola, ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Tujuan penetapan Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	100%
		2. Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	100%
		3. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	100%
		4. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding	100%
		5. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	100%
		6. Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		7. Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	100%

## E. Program/Kegiatan dan Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 dalam rangka mendukung pelaksanaan Sasaran Kinerja yang telah diperjanjikan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2022

<b>Kode Rekening</b>	<b>Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
1	2	3
<b>4.01.05</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>742.974.300</b>
<b>4.01.05.1.01</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</b>	<b>506.165.300</b>
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	156.489.000
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	74.840.200
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	149.371.000
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	125.465.100
<b>4.01.05.1.02</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>323.477.700</b>
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	227.236.000
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litgasi dan HAM	96.241.700

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat dan mengetahui kinerja Biro Hukum, capaian kinerja organisasi yang dilakukan adalah menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data yang bersumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari Biro Hukum
- b. Data eksternal yang berasal dari luar Biro Hukum.

Dari data internal maupun eksternal dalam rangka memperoleh data kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten dengan bantuan instrumen formulir pengukuran kinerja kegiatan.

##### 1. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 100 %

- Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas
- Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas
- Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama
- Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding
- Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi
- Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas

##### 2. Capaian Target Kinerja dan realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun lalu

###### Program Fasilitasi dan koordinasi Hukum

Jumlah Produk Hukum Daerah tahun ini dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Perda	10	10	10	10	14	11	16	9
Perkada	30	30	30	30	60	87	56	114
Kept. Gub	700	700	700	700	992	922	828	928

- Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Perda/Perkada	40	40	40	40	74	98	72	123
Naskah Perjanjian	20	20	25	25	20	44	103	387

- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Perda/Perbup/Perwal	120	120	150	150	247	185	269	259

- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Perkara	4	4	4	4	8	6	6	18

- Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Perkara	1	4	4	4	8	3	6	12
RANHAM (Dok)	15	15	3	3	18	15	3	3

### **3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB disusun dan dituangkan dengan didasarkan pada memfokuskan tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada dalam mendukung setiap program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

### **4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dari target dan realisasi kinerja Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang dibebankan melalui program/kegiatan rutin Biro Hukum setiap tahunnya dapat dikatakan mengalami peningkatan dan keberhasilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan target dan realisasi setiap tahunnya yang mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan.

Program/kegiatan keberhasilan ini didukung dari beberapa komponen yang ada antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin hari semakin baik dalam pemberian pelayanan.
1. Adanya dukungan yang semakin kuat dari pemerintah dan pihak terkait terhadap peningkatan HAM.
2. Koordinasi internal Biro Hukum yang optimal.
3. Dukungan dari pihak-pihak terkait Badan Dinas PD dan lembaga – lembaga lainnya.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
5. Dukungan kebijakan dan peraturan yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan.
6. Dukungan dana untuk melaksanakan program / kegiatan setiap tahunnya relatif semakin membaik.
8. Adanya inovasi program percepatan pelayanan produk hukum



## B. REALISASI KEUANGAN

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh dana sebesar Rp. 1.302.000.000 realisasi sebesar Rp.1.265.203.684 (97,17%) untuk Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Anggaran Rp. 742.974.300 realisasi sebesar Rp. 729.564.912 (98,20%)

### **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum terdiri dari :**

#### **Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan**

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
  - Masukan : - Target Rp. 156.489.000 (seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
    - Realisasi Rp. 154.246.747 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh enam tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)
    - Prosentase 98,57 %
  - Keluaran : Tersusunnya Rancangan
    - Peraturan Daerah 9 buah
    - Peraturan Gubernur 114 buah
    - Keputusan Gubernur 928 buah
  - Hasil : Terbentuknya Perda/Pergub
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
  - Masukan : - Target Rp. 74.840.200 (lima puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
    - Realisasi Rp. 74.800.200 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah)
    - Prosentase 99,95 %
  - Keluaran : Tersusunnya Rancangan
    - Keputusan Gubernur 928 buah
  - Hasil : Terbentuknya Keputusan Gubernur
- Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya
  - Masukan : - Target Rp. 149.371.000 ( seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

- Realisasi Rp. 144.451.000 (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
  - Prosentase 96,71 %
- Keluaran : Terdokumentasinya/tersosialisasinya Produk Hukum di Web JDIIH dan tersusunnya MoU dan Perjanjian Kerjasama
- Hasil : Terkajinya naskah perjanjian kerjasama Pemda dengan Pihak Ketiga
- Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota
- Masukan : - Target Rp. 125.465.100 (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima seratus rupiah)
- Realisasi Rp. 124.943.665 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
  - Prosentase 99,58 %
- Keluaran : Terfasilitasi/terevaluasinya Produk Hukum Daerah Kab./Kota
- Hasil : Tertata/tidak bertentangnya Produk Hukum Kab./Kota dengan aturan yang baru dan lebih tinggi.

### **Fasilitasi Bantuan Hukum**

- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- Masukan : - Target Rp. 196.560.000 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Realisasi Rp. 193.725.300 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
  - Prosentase 98,56 %
- Keluaran : Tertanganinya 18 Kasus/Sengketa Hukum Litigasi
- Hasil : Adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
- Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM
- Masukan : - Target Rp. 40.249.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

- Realisasi Rp. 37.398.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Prosentase 92,92 %

Keluaran : Tertanganinya 12 perkara mediasi dan 3 Dokumen RANHAM

Hasil : Adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat dan tersedianya dokumen pelaporan Aksi HAM

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Memperhatikan uraian-uraian diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Biro Hukum, yang ditindak lanjuti dengan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) untuk Tahun 2022 cukup berhasil.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Biro Hukum Setda Provinsi NTB dikarenakan :

- a. Kemampuan SDM yang semakin baik dalam memberikan pelayanan.
- b. Adanya komitmen Pemerintah terhadap peningkatan HAM.
- c. Adanya persepsi/koordinasi yang optimal antar bagian.
- d. Adanya dukungan dari Badan/Dinas-dinas yang terkait serta stakeholder.
- e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
- f. Adanya dukungan/kebijakan dan Regulasi dalam melaksanakan program/kegiatan.
- g. Adanya inovasi percepatan pelayanan produk hukum

Untuk mengantisipasi beberapa kendala dan tantangan yang belum dapat diselesaikan Tahun 2022, maka waktu mendatang diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi kendala/tantangan tersebut sehingga kinerja menjadi lebih baik.

**Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja organisasi :**

1. Meningkatkan SDM yang ada dengan diadakannya pelatihan/diklat
2. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal pembentukan produk-produk hukum daerah
3. Peningkatan sarana dan prasaran kerja